URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Dera Nugraha^{1*}, Uus Ruswandi², M. Erihadiana³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Indonesia.

nugrahaderal@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan bangsa multikultural dengan tingkat pluralisme yang tinggi. Hal itu dapat menjadi potensi kemajuan bangsa sekaligus kemundurannya, bergantung pada kualitas pengelolaan heterogenitas tersebut. Hingga saat ini terbukti konflik yang dilatarbelakangi suku, agama, dan ras antargolongan (SARA) masih sering terjadi. Hal tersebut menunjukkan pentingnya penguatan pendidikan multikultural di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menyegarkan kembali urgensi pendidikan multikultural sekaligus menghadirkan gagasan penguatannya untuk bangsa Indonesia. Suatu pendekatan yang lebih komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, menjelaskan fenomena yang terjadi didasari oleh kajian-kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Konflik SARA masih rentan terjadi karena keterbatasan pemerataan layanan pendidikan multikultural dan pendekatannya yang masih parsial. Diperlukan pendekatan lebih menyeluruh dan melibatkan banyak pihak. Dengan demikian, pendidikan multikultural sebagai bagian dari pendidikan karakter akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil.

Kata Kunci : *Indonesia, multikultural, multikulturalisme, pendidikan, pluralisme*

ABSTRACT

Indonesia is a multicultural nation with a high level of pluralism. This can be a potential for the nation's development and its setback, depending on the pluralism management. Currently multicultural conflicts between ethnic, religious and racial groups (SARA) are still happen. This shows the multicultural education strengthening in Indonesia is importance. This paper aims to refresh the urgency of multicultural education and suggest the idea of its strengthening for the Indonesian people. A more comprehensive approach. The research method used is library research, explaining the phenomena that occur based on previous scientific studies. The SARA conflicts are still happen caused by the limited of equal distribution of multicultural education services and its partial approach. A more comprehensive approach is needed. Thus, multicultural education as a part of character education will have a better opportunity to meet desired goals.

Keywords : Education, Indonesia, multicultural, multiculturalism, pluralism

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural terbesar di dunia. Memiliki banyak kelompok suku, etnis, agama, dan budaya. Negara kepulauan yang memiliki 13.000 pulau, 300 suku bangsa, dan 200 bahasa (Nurchayono, 2018). Masyarakatnya menganut 6 agama (Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Budha, dan Konghuchu) serta berbagai aliran kepercayaan. Keberagaman bangsa tersebut dapat menjadi potensi sekaligus resiko. Potensi untuk kedaulatan diatas keberagaman, dan resiko konflik disebabkan keberagaman itu sendiri. Keragaman masyarakat multikultural sebagai asset kekayaan bangsa di satu sisi, dan kondisi sangat rawan konflik serta perpecahan di sisi lain (Lestari, 2015). Pengelolaan keberagaman tersebut menjadi sangat penting untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia dan memperjuangkan kemajuannya.

Masyarakat majemuk (*plural society*) sebagai identitas bangsa Indonesia meniscayakan suatu kosep persatuan diatas keberagaman. Disanalah konsep multikulturalisme diharapkan hadir. Multikulturalisme berpijak pada pengakuan tentang keanekaragaman dari suatu masyarakat yang heterogen. Heterogenitas tersebut bisa dimaknai sebagai suatu keanekaragaman budaya, tradisi, gaya hidup, agama dan bentuk-bentuk perbedaan yang lainnya. Lemahnya multikulturalisme ditengah kemajemukan masyarakat dapat memantik konflik yang sangat

merugikan banyak pihak. Konflik tersebut dapat distimulasi oleh isu politik, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Pemilihan presiden tahun 2019 bisa menjadi salah satu contoh hangat. Isu agama, suku, golongan bermunculan. Bahasan mayoritas dan minoritas mencuat di sosial media secara masif. Fenomena merebaknya konten sosial media berbau SARA yang menyebabkan konflik pada masa pemilihan Gubernur DKI (Evelina, 2015), seperti terulang kembali dalam skala nasional. Berbagai konflik dan ketegangan internal bangsa tidak bisa dihindari. Fenomena tersebut dapat menjadi salah satu indikator lemahnya kesadaran multikulturalisme bangsa Indonesia. Karena jika kesadaran multikulturalisme telah mengakar, maka konflik yang mengatasnamakan keberagaman akan mudah dihindari.

Secara lebih spesifik, diantara konflik multikultural yang hingga saat ini masih belum teratasi adalah konflik antar pemeluk agama. Baik antar pemeluk satu agama, maupun antar pemeluk agama yang berbeda. Pembakaran gereja dan aksi boikot tokoh agama tertentu yang terjadi misalnya.

Kondisi tersebut diatas cukup menjadi dasar urgensi penguatan pendidikan multikultural di Indonesia. Kendati isu pendidikan multikultural telah menjadi wacana akademik sejak tahun 2000-an. Beragam forum akademik (seminar, workshop, dan diskusi publik bertemakan pendidikan multikultural) bermunculan. Faktanya masalah pluralitas belum teratasi dengan sempurna. Tulisan ini hadir untuk kembali mengingatkan pentingnya penguatan pendidikan multikultural saat ini, dan menggagas bagaimana pelaksanaannya. Terlebih isu globalisasi dengan jargon *internet of thing* tengah mencuat kepermukaan. Artinya, tantangan penguatan pendidikan multikultural di Indonesia kini “diperkaya” oleh isu-isu kebudayaan global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, menjelaskan fenomena yang terjadi didasari oleh kajian-kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya. Mempelajari referensi-referensi dalam bentuk buku-buku, artikel jurnal, dan informasi-informasi faktual yang berhubungan dengan pembahasan. Peneliti mengumpulkan, menyeleksi, dan menganalisa informasi-informasi terkait untuk kemudian menyusun gagasannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Multikulturalisme

Multikulturalisme mencakup suatu penghargaan, pemahaman, serta penilaian atas budaya seseorang, diiringi suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis pihak lain (Lawrence Blum, dikutip Lubis, 2006:174). Multikulturalisme juga dipandang sebagai suatu ideologi yang mengakui serta mengagungkan perbedaan dalam kesetaraan baik secara individual maupun secara budaya (Suparlan, 2002). Menurut Taylor dalam Wattimena, R. A. A. (2011), ide multikulturalisme adalah suatu ide untuk mengatur perbedaan dengan prinsip-prinsip pengakuan akan perbedaan itu sendiri. Ide ini menyangkut pengaturan relasi antar kelompok, eksistensi kelompok pendatang, masyarakat adat, dan lainnya. Secara substantif multikulturalisme adalah kelapangan menerima kelompok lain secara sejajar sebagai kesatuan dalam perbedaan, tanpa menghiraukan perbedaan kultural, jenis kelamin, agama, atau pun bahasa. Fokus multikulturalisme adalah pemahaman terhadap kehidupan yang kaya perbedaan kebudayaan secara personal maupun kelegial.

Multikulturalisme berkembang pesat pasca Perang Dunia II, karena gelombang migrasi penduduk dunia yang disebabkan kebutuhan karyawan untuk pembangunan kembali setelah perang. Terdapat kelompok yang cukup besar berasal dari Eropa Timur dan Turki di Jerman. Kelompok besar kaum migran dari Afrika di Prancis. Pembahasan multikulturalisme secara akademik di Universitas Birmingham sebagai studi kultural di Inggris. Mengetengahkan budaya elit dan budaya rakyat biasa yang mempunyai derajat yang sama. Di Amerika Serikat multikulturalisme lahir dari suatu perlawanan rakyat terhadap politik segregasi, yang membedakan derajat kulit hitam dan kulit putih. Di Australia multikulturalisme mulai berkembang dengan berakhirnya politik *White Australia*. Di Indonesia, secara historis multikulturalisme tumbuh dan berkembang dari nasionalisme seiring dengan perlawanan atas penjajahan (Tilaar, 2014).

Multikulturalisme bisa dikatakan lahir karena keberadaan masyarakat plural. Pluralitas masyarakat tersebut melahirkan berbagai bentuk multikulturalisme, antara lain :

1. Multikulturalisme Isolasi. Bernagai masyarakat kultural hidup secara mandiri dan terlibat dalam hubungan normal yang saling mengenal satu sama lain. Artinya saling menerima perbedaan, tapi masing-masing berusaha untuk mempertahankan budaya mereka. Seperti suku Kajang di Kabupaten Bulukumba.

2. Multikulturalisme Akomodatif. Masyarakat pemilik budaya dominan menyediakan penyesuaian-penyesuaian akomodatif bagi kelompok minoritas. Kelompok minoritas tersebut tidak menentang budaya dominan, seperti masyarakat suku Jawa yang tinggal di daerah Palopo.
3. Multikulturalisme Otonomi. Beberapa kelompok budaya berusaha menciptakan kesejajaran dan menginginkan kehidupan otonom yang dapat diterima semua pihak.
4. Multikulturalisme Kritis. Terjadi dalam masyarakat plural dimana berbagai kelompok tidak menginginkan kehidupan otonom, tapi mengharapkan pembentukan budaya kolektif yang menitikberatkan berbagai perspektif distingtif. Kelompok budaya dominan pada dasarnya menolak dan berusaha menerapkan budaya dominannya. Seperti kelompok LGBT di tengah masyarakat Indonesia.
5. Multikulturalisme Kosmopolitan. Multikulturalisme yang berupaya menghapus segala bentuk batas budaya untuk mewujudkan suatu masyarakat dimana setiap individu tidak terikat pada kultur tertentu. Mereka memiliki kebebasan lintas kultural, menikmati kultur kelompok lain atau mengembangkan kultur sendiri.

Untuk menjaga persatuan masyarakat multibudaya, diantara beberapa hal yang perlu dihindari: (1) Primordialisme, perasaan kesukuan yang berlebihan. Berfikir suku bangsa sendiri yang terunggul. (2) Etnosentrisme, pandangan yang berpangkal pada kebudayaannya sendiri. Cenderung meremehkan budaya kelompok lain. (3) Diskriminatif, sikap membedakan terhadap sesama warga berdasarkan golongan, warna kulit, ekonomi, suku bangsa, agama, dan unsur budaya lainnya. (4) Stereotip, konsepsi mengenai sifat general suatu kelompok berdasarkan prasangka. Tanpa menghindari hal-hal tersebut diatas, sangat sulit menghindari konflik di negara yang sangat multikultural seperti Indonesia. Konflik dapat diartikan sebagai ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antara kelompok atau gagasan-gagasan yang berlawanan. Ia juga bisa berarti perang, atau upaya berada dalam pihak yang bersebrangan. Atau dengan kata lain, ketidaksetujuan antara beberapa pihak (Aisyah, 2014).

Mengenai konflik antar pemeluk agama. Yunus (2014) menyampaikan dua penyebab utamanya. Antara lain klaim kebenaran (*truth claim*) serta doktrin jihad. Dua hal tersebut yang memicu ketegangan hingga konflik antar pemeluk agama. Klaim kebenaran yang lebih terlihat sebagai arogansi intelektual, serta doktrin jihad yang tidak dimaknai secara bijaksana dan kontekstual.

Untuk mengatasi kedua faktor konflik antar pemeluk agama tersebut adalah dengan menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama (Yunus, 2014). Mengikis semua sumber sikap intoleransi yang dapat memicu konflik agama dan berbagai konflik lainnya.

Mashudi (2016) mengetengahkan hasil penelitiannya tentang penyelesaian konflik antar umat beragama di Jepara. Mengoptimalkan pendekatan hati, artinya komunikasi intensif dan dialog antar umat beragama secara rutin hingga dinyatakan tuntas.

Pendidikan Multikultural di Indonesia

Pendidikan menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Normina, 2017), pendidikan merupakan tuntutan dalam tumbuh kembangnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala potensi yang ada pada diri anak-anak, agar mereka sebagai individu sekaligus anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan secara maksimal.

Tobroni, dkk (2007, dalam Wihardit; 2010) mengetengahkan definisi pendidikan multikultural sebagai pendidikan yang membuka kesempatan pada semua peserta didiknya tanpa memandang kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, budaya, dan agamanya. Ambarudin (2016) mengutarakan arti pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan yang terwujud pada kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan, dimana memposisikan perbedaan sebagai hal biasa. Maka peserta didik menjadi terbiasa dan tidak mempersoalkan perbedaan untuk berinteraksi dan berteman, tidak menghiraukan perbedaan latar belakang suku bangsa, agama, maupun adat istiadat yang ada.

Dari definisi-definisi tercantum diatas, dapat disimak bahwa kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, serta skill yang dibutuhkan peserta didik sebagai individu dan anggota masyarakat, bangsa, dan negara tidak luput dari pemahaman dan sikap multikultural.

Pendidikan multikultural penting untuk peserta didik, agar mereka memahami dan menerima perbedaan kebudayaan sebagai sebuah keniscayaan. Heterogenitas budaya yang mempengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan sikap manusia yang beragam. Melalui Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn) yang menjadi mata pelajaran / mata kuliah wajib pada pendidikan formal, Indonesia menaruh harapan besar untuk bisa mentransfer nilai-nilai multikulturalisme kepada setiap generasi. Nilai multikulturalisme tersebut terkandung dalam ideologi Pancasila dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika (*unity in diversity*).

Masih terjadinya konflik multikultural yang dilatarbelakangi perbedaan budaya, agama dan aspek kultural lainnya, menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia belum mencapai hasil maksimal dan merata. Penyebab belum maksimal dan meratanya pendidikan multikultural di Indonesia karena belum meratanya layanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah keatas, bisa menikmati layanan pendidikan yang sangat berkualitas. Sebaliknya masyarakat dengan kelas ekonomi rendah hanya bisa menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang tidak memerlukan biaya pendidikan besar, dengan fasilitas pendidikan yang sangat berbeda. Kesenjangan akses dan mutu pendidikan di Indonesia masih kontras terjadi (Aditomo dan Felicia, 2018).

Berbeda dengan Finlandia. Tidak ada istilah sekolah unggulan, sekolah favorit, sekolah biasa, karena negara mampu menyediakan kualitas layanan pendidikan yang merata di semua sekolah untuk semua peserta didiknya (Adiputri, 2019). Hal ini sejalan dengan pandangan Banks (2010; 3) : *Multicultural education incorporates the idea that all students—regardless of their gender, social class, and ethnic, racial, or cultural characteristics—should have an equal opportunity to learn in school.*

Poin berikutnya yang menjadi penyebab belum tercapainya hasil pendidikan multikultural yang maksimal dan merata, karena pendidikan multikultural masih dilakukan secara parsial. Bahkan hanya mengandalkan pembelajaran PKn. Pendidikan multikultural sejatinya didesain secara komprehensif. Semua mata pelajaran/ mata kuliah ikut berkontribusi dalam mentransfer nilai-nilai multikulturalisme. Lebih dari itu, tripusat pendidikan seyogianya mengambil bagian dalam penguatan pendidikan multikultural. Karena hakikatnya pendidikan multikultural tidak bisa dipisahkan dari pendidikan karakter, dimana semua dimensi pendidikan (termasuk masyarakat) ikut bertanggungjawab. Jika demikian, barulah pendidikan multicultural berpeluang lebih besar dalam menjawab kebutuhan bangsa dan negara Indonesia dalam mengokohkan persatuan diatas keberagaman.

KESIMPULAN

Multikulturalisme adalah suatu gagasan yang bertujuan mengelola keberagaman dengan prinsip kesetaraan dan pengakuan untuk tujuan bersama. Gagasan tersebut menyangkut pengaturan relasi antara kelompok kultural yang ada. Fokus multikulturalisme terdapat pada pemahaman terhadap kehidupan yang penuh dengan perbedaan kebudayaan secara individu maupun kelompok.

Sebagai negara multikultural terbesar, Indonesia memiliki aset keanekaragaman budaya yang melimpah. Keberagaman tersebut sejatinya dapat dilestarikan dan dikelola untuk menopang kemajuan bangsanya. Pengelolaan multikultural tersebut tidak mungkin terjadi dengan baik tanpa pendidikan multikultural. Untuk mewujudkan kesatuan Indonesia diperlukan transformasi kesadaran multikulturalisme menjadi atribut nasional dengan bersandar pada penghargaan terhadap keberagaman dan pluralitas masyarakatnya (Aris Shofa; 2016).

Konflik multikultural yang dewasa ini masih sering terjadi, menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia masih perlu perhatian. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh belum meratanya layanan pendidikan yang diterima oleh masyarakat, serta implementasi pendidikan multikultural yang masih dilakukan secara parsial. Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan implementasi pendidikan multikultural yang lebih komprehensif dapat membantu meningkatkan performa capaian pendidikan multikultural itu sendiri.

Konflik antar pemeluk agama yang masih terjadi di Indonesia disebabkan oleh dua factor; arogansi klaim kebenaran dan doktrin jihad yang pemaknaannya tidak tepat. Untuk mengatasinya perlu pendidikan toleransi dan dialog antar umat beragama yang difasilitasi oleh Lembaga keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditomo, Nisa Felicia. (2018). Ketimpangan Mutu Dan Akses Pendidikan Di Indonesia: Potret Berdasarkan Survei PISA 2015. *Kilas Pendidikan Edisi* 19(8):1–9.
- Ambarudin, R. Ibnu. (2016). Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa Yang Nasionalis Religius. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 13(1).
- Banks, Cherry A. McGee and James A. Banks. (2010). *Multicultural Education*. 7th ed. WILEY.
- BM, St. Aisyah. (2014). Konflik Sosial Dalam Hubunga Antar Umat

- Beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh* 15(2):189–208.
- Adiputri, Ratih D. (2019). *Sistem Pendidikan Finlandia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Evelina, Lidya Wati. (2015). Analisis Isu S (Suku) A (Agama) R (Ras) A (Antar Golongan) Di Media Social Indonesia. *Jurnal ULTIMA Comm* 7(1):107–22.
- Hanafy, Muhammad Sain. (2015). Pendidikan Multikultural Dan Dinamika Ruang Kebebasan. *Jurnal Diskursus Islam* 3(1):119–39.
- Hansen, Klaus P., Stefanie Rathje, and Mario Schulz. (2009). The Definition of Culture: An Application-Oriented Overhaul, in: *Interculture Journal* 2009/08. *Interculture Journal* 8(8):35–58.
- Kharisma, Tiara. (2017). Konflik SARA Pada Pilkada DKI Jakarta Di Grup WhatsApp Dengan Anggota Multikultural. *Jurnal Penelitian Komunikasi* 20(2):107–20.
- Kuswaya Wihardit. (2010). Pendidikan Multikultural: Suatu Konsep, Pendekatan Dan Solusi. *Jurnal Pendidikan* 11(2):96–105.
- Lestari, Gina. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* I(Februari):31–37.
- Lestariningsih, Wahyu Adya, Jayusman Jayusman, and Arif Purnomo. (2018). Penanaman Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Rembang Tahun Pelajaran 2017/2018. *Indonesian Journal of History Education* 6(2):123–31.
- Lubis, Akhyar Yusuf. (2006). *Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies*. Pustaka Indonesia Satu.
- Mashudi, Mashudi. (2016). Menyelesaikan Konflik Kerukuan Umat Beragama Dengan Hati. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 16(2):249.
- Normina. (2017). Pendidikan Dalam Kebudayaan. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 15(28):17–28.
- Nurchayono, Okta Hadi. (2018). Pendidikan Multikultural Di Indonesia: Analisis Sinkronis Dan Diakronis. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi Dan Antropologi* 2(1):105–15.
- Oki Rahadiano, Sutopo. (2017). Rasisme Dan Marginalisasi dalam Sejarah Sosiologi Amerika. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21(2):285–90.
- Shofa, Abd Mu'id Aris. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila. *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 1(1):34–41.
- Suparlan, Parsudi. (2014). Menuju Masyarakat Indonesia Yang

- Multikultural. *Antropologi Indonesia* 0(69):16–19.
- Suparlan, Supardi. (2002). Multikulturalisme. *Jurnal Ketahanan Nasional* 7(1):9–18.
- Tilaar, H.A.R. (2014). Multikulturalisme, Bahasa Indonesia, Dan Nasionalisme Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Dialektika : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol 1, No 2 (2014)
- Wattimena, Reza A. (2011). Menuju Indonesia Yang Bermakna: Analisis Tekstual-Empiris Terhadap Pemikiran Charles Taylor Tentang Politik Pengakuan dan Multikulturalisme, Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Studia Philosophica et Theologica* 11(1):1–30.
- Widyawati, Anis (2015). Akar Konflik dalam Masyarakat Multikultural di Karimunjawa. *Yustisia Jurnal Hukum* 93(3):602–16.
- Yunus, Firdaus M. (2014). Konflik Agama Di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia* 16(2):217–28